

KERUGIAN EKONOMI NASIONAL AKIBAT PANDEMI COVID-19

Wibowo Hadiwardoyo^{1*}

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Hidayatullah, Depok, Jawa Barat

*Email: bmgraph@yahoo.com

Abstrak

Pembatasan aktivitas akibat pandemi Covid-19 telah menimbulkan kerugian ekonomi secara nasional. Kerugian itu hanya akan tertutupi apabila krisis dapat diakhiri sebelum menimbulkan kebangkrutan usaha secara massal. Tulisan ini dibuat sebelum PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) berakhir sehingga analisis ini masih didasarkan pada perhitungan apabila PSBB berjalan selama 1 bulan di area Jabodetabek. Sedangkan apabila PSBB diperlama dan atau diperluas ke kota-kota lain, maka otomatis dampak kerugian membesar, dan dapat diproyeksikan berdasar perbandingan waktu dan luasan area. Untuk memudahkan, pembahasan kerugian dibagi dalam kelompok kerugian nasional, sektoral, corporate, maupun individu.

Kata Kunci: Kerugian Ekonomi, PSBB, Pandemic

PENDAHULUAN

Merespon pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pemerintah Indonesia mulai menerapkan pembatasan dengan kebijakan social distancing (jaga jarak sosial, menghindari kerumunan), lalu physical distancing (jaga jarak antar orang minimal 1,8 meter) sejak awal Maret 2020. Kebijakan itu telah menurunkan secara drastis aktivitas dan pergerakan orang di Jabodetabek dan kota-kota besar. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya jumlah penumpang pada berbagai sarana transportasi mulai pesawat terbang, kereta api komuter, bus dan busway, angkot, taksi, taksi online, bajaj, hingga ojek dan ojek online (ojol).

Perusahaan bus antar kota telah mengandangkan hingga 80% armadanya pada pertengahan Maret 2020. PT KAI membatalkan 44 rute dari Jakarta ke kota-

kota di Jawa selama bulan April (republika.co.id, 23&/20). Demikian pula maskapai penerbangan yang mulai berebut area parkir karena pesawatnya banyak yang tidak dioperasikan. Sementara itu para driver taksi dan taksi online telah mengeluhkan penurunan penumpang hingga 70% sehingga sebagian besar memilih untuk libur operasi atau pulang kampung. Para driver ojol menyampaikan penurunan jumlah penumpang hingga lebih 80% (motorplus-online.com).

Namun pembatasan sosial yang berupa himbauan itu rupanya dianggap kurang efektif dalam mencegah penularan Covid-19. Oleh karena sebagian kantor dan industri tetap buka, dan didesak kebutuhan hidup, banyak kalangan yang tetap beraktivitas menggunakan kendaraan pribadi. Akhirnya pada 10 April, atas persetujuan pemerintah pusat, dimulailah

penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta. Selanjutnya disusul Bodetabek beberapa hari kemudian, dan kota-kota besar lainnya.

Dengan adanya PSBB maka perkantoran dan sebagian besar industri dilarang beroperasi, untuk kurun yang relatif lama, dan menimbulkan kerugian ekonomi. Tulisan ini dibuat sebelum PSBB berakhir sehingga total kerugian secara presisi belum diketahui. Untuk mempermudah kalkulasi, analisis dimulai dari Jabodetabek, dengan asumsi pelaksanaan selama 1 bulan. Sedangkan apabila PSBB diperpanjang dan atau diperluas ke kota-kota lain, maka otomatis dampak kerugian membesar, dan dapat diproyeksikan berdasar perbandingan waktu dan luasan area. Selanjutnya pembahasan kerugian dibagi dalam kelompok kerugian nasional, sektoral, corporate, maupun individual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi yaitu sebuah metode riset yang berupaya mengungkap esensi universal dari fenomena yang dialami secara personal oleh sekelompok individu (Cresswell: 1998). Data riset fenomenologis diperoleh dari berbagai hasil wawancara yang dilansir dari berbagai media, yang berfokus pada kerugian ekonomi akibat pandemik covid-19 di Indonesia dari ditemukannya kasus covid pertama di Jakarta 2 Maret 2020 hingga 10 April 2020. Medium yang berada di internet memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun interaksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain dan

membentuk ikatan sosial secara virtual (lih. Fuchs: 2011). Tulisan ini menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi serta dinamika hubungan fenomena yang diamati pada berbagai berita tentang pandemik covid-19 di Indonesia dampaknya terhadap ekonomi secara nasional setelah pemberlakuan PSBB. Data ditranskrip, lalu dengan merujuk pada rumusan masalah, peneliti melakukan koding, klastering, labelling secara tematik dan melakukan interpretasi.

Sumber data:

- a. www.bps.go.id
- b. www.detik.com
- c. www.cnbcindonesia.com
- d. www.kompas.tv
- e. www.bisnis.com
- f. www.pasardana.id

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerugian Nasional

Kerugian yang paling mudah dihitung adalah kerugian agregat secara nasional. Namun karena bersifat makro, maka perhitungan ini hanya digunakan oleh pelaku ekonomi skala besar, atau oleh negara dalam menyusun (revisi) APBN. Salah satu cara menghitung dapat menggunakan acuan Produk Domestik Bruto (PDB), yang merupakan akumulasi total produksi di sebuah negara selama setahun.

PDB per kapita Indonesia per tahun pada 2019 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah USD 4.174,9 atau Rp 59,1 juta (kurs Rp 14.156- per USD). Dengan jumlah penduduk 267 juta jiwa, maka PDB Indonesia pada 2019 adalah sebesar Rp

15.833,9 Triliun (www.bps.go.id). Adapun proporsi wilayah dalam PDB atau dikenal dengan PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto), mengacu pada data BPS sebelumnya adalah, DKI Jakarta sebesar 17,53% (terhadap PDB), Bodetabek (Kabupaten & Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten & Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan) sebesar 7,3%, dan Bandung Raya (Kota & Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi) menyumbang 3% terhadap PDB. Sementara itu data Indef menyatakan, perputaran uang RI berada di Jakarta (Jabodetabek) sebesar 70%. Ini juga dapat ditafsirkan Jabodetabek mempengaruhi 70% PDB Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 semula diperkirakan sebesar 5,3%, Namun angka ini terkoreksi sebagai dampak pandemi Corona, dan sebagian kalangan memprediksikan pertumbuhan di bawah 2%. Mengingat terjadi ketidakpastian dan prediksi berbeda-beda, serta terjadi fluktuasi kurs USD (peningkatan drastis menjadi Rp 16.000 p-er USD pada awal April 2020), maka penulis memilih untuk mengabaikan kedua faktor tersebut, yakni pertumbuhan ekonomi Januari-April 2020 dan kurs USD pada masa krisis. Sehingga angka PDB yang digunakan pada tulisan ini adalah acuan 2019.

Jadi berapa kerugian ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19? Ada 2 pilihan dalam menghitung kerugian. Cara pertama menggunakan asumsi perputaran uang di Jabodetabek sebesar 70% dari total uang beredar di Indonesia. Apabila ini diartikan 70% PDB Indonesia dipengaruhi pergerakan ekonomi di Jabodetabek, maka

penghentian aktivitas secara total di Jabodetabek selama 1 bulan akan menimbulkan kerugian nasional sebesar = $1/12 \times 70\% \times \text{Rp } 15.833 \text{ Triliun} = \text{Rp } 923 \text{ Triliun}$. Namun apabila penghentian itu tidak total karena masih ada beberapa jenis kegiatan yang tidak dilarang beroperasi, seperti sektor kesehatan, makanan pokok, industri strategis, dsb, kerugian akan lebih kecil. Bila angka aktivitas berkisar 10%, maka kerugian akan menjadi $90\% \times \text{Rp } 923 \text{ Triliun}$ atau sekitar Rp 830 Triliun. Apabila PSBB Jabodetabek diperpanjang 2 pekan, maka kerugian nasional akan mencapai $1,5 \times \text{Rp } 830 \text{ Triliun} = \text{Rp } 1.260 \text{ Triliun}$ atau setengah dari anggaran belanja negara pada APBN 2020.

Cara kedua adalah dengan menggunakan perbandingan proporsi PDRB dari kawasan yang memberlakukan pembatasan sosial. PDRB Jabodetabek secara akumulasi adalah sebesar 24,83% dari PDB nasional. Maka pembatasan aktivitas dengan ketentuan serupa di atas, di Jabodetabek selama 1 bulan menimbulkan kerugian sebesar $1/12 \times 24,83\% \times \text{Rp } 15.833 \text{ Triliun} \times 90\% = \text{Rp } 294,85 \text{ Triliun}$. Apabila diperpanjang 2 pekan, kerugian akan menjadi sekitar Rp 442,3 Triliun. Dan apabila diikuti oleh Bandung Raya dalam kurun yang sama, akan menambah kerugian 17,6% (yaitu $3\%/17\% \times 442,3 \text{ T} = 75,1 \text{ T}$) menjadi Rp 517,5 Triliun.

Kerugian-kerugian akibat pembatasan di kawasan lainnya dapat dihitung dengan menggunakan metoda yang sama, yakni membandingkan proporsi PDRB terhadap PDB selama kurun waktu yang diperbandingkan dengan 12 bulan.

Manakah hasil perhitungan yang lebih valid? Kedua-duanya memiliki dasar legitimasi. Menggunakan acuan uang beredar dapat diterima dengan argumentasi bahwa sebagian besar kegiatan ekonomi skala besar di daerah, pada prosesnya melibatkan juga Jakarta, baik karena kantor pusat maupun karena transaksi dengan pihak ketiga. Sehingga aktivitas itu tercermin juga dari perputaran uang tersebut. Yang perlu divalidasi adalah besarnya prosentase perputaran uang di Jabotabek, apakah benar 70% atau kurang dari itu.

Adapun perhitungan kedua, menggunakan proporsi PDRB terhadap PDB juga dapat diterima, mengingat data itu merupakan gambaran riil aktivitas ekonomi pada kurun pencatatan. Dan metode ini juga akan memudahkan penghitungan apabila semakin banyak daerah-daerah yang menerapkan PSBB, dan dalam rentang waktu berbeda. Misalnya Sumatera Barat, yang berkontribusi 1,5% terhadap PDB, PSBB selama sebulan akan menimbulkan kerugian ekonomi sekitar Rp 16,6 Triliun. Demikian juga PSBB di Kota Pekanbaru, Kota Malang, Kota Tegal, Surabaya, dlsb dapat dihitung efek kerugiannya dengan mudah.

Mempertimbangkan ketiadaan data proporsi uang beredar per daerah selain Jabodetabek, maka penulis lebih memilih menggunakan metode kedua dalam perhitungan. Hal ini disebabkan PSBB telah diberlakukan secara luas, dan terus bertambah, sehingga perhitungan yang hanya menggunakan acuan Jabodetabek menjadi tidak valid.

Kerugian Sektoral

Kerugian ekonomi secara nasional akan mempengaruhi APBN. Dan koreksi telah dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 1 April 2020 (www.pasardana.id,02/04/20). Namun bagi pelaku usaha, angka agregat itu belum selalu dapat digunakan. Hal ini mengingat tidak seluruh sektor bisnis mengalami kerugian yang sama. Bahkan ada sektor tertentu yang mendapatkan keuntungan dari adanya pembatasan sosial. Oleh karena itu diperlukan perhitungan berdasar sektor bisnis, dan selanjutnya perhitungan masing-masing perusahaan (korporasi).

Dari total kerugian sekitar Rp 517 Triliun di atas (Jabodetabek + Bandung Raya selama 1,5 bulan), terdapat beberapa sektor yang memiliki andil kerugian terbesar. Sektor bisnis yang paling terpukul adalah yang mengandalkan keramaian (seperti pariwisata, event atau pertunjukan, pameran, mall); lalu bisnis pendukungnya (seperti transportasi massal, ticketing, hotel, perdagangan musiman/souvenir, dll); bisnis yang tidak dapat menerapkan physical/social distancing (seperti salon, pangkas rambut, ojek, spa, permainan anak-anak, hingga jasa pembersihan rumah, dll); bisnis produk tersier yang penjualannya tergantung pada dana tabungan masyarakat (seperti properti, kendaraan pribadi, perawatan tubuh, hobby, dll) serta bisnis pendukungnya seperti leasing dan lembaga pemberi kredit lainnya. Sektor energi juga mengalami tekanan besar karena aktivitas bisnis yang menyusut drastis, kecuali PLN. Dan masih banyak sektor lainnya yang terimbas secara variatif. Adapun sektor bisnis yang berpotensi mendapatkan keuntungan dari adanya

pembatasan sosial di antaranya adalah penyedia layanan pengiriman barang, operator seluler dan internet provider, penyedia kredit darurat, asuransi kesehatan, dan sejenisnya. Tentu dengan catatan PSBB tidak terlalu lama sehingga masyarakat masih memiliki tabungan, dan para penyedia jasa mampu melakukan inovasi dan layanan secara memadai.

Bisnis sektor kesehatan berpotensi juga menghasilkan keuntungan, untuk jenis-jenis produk tertentu. Misalnya oleh karena semua warga diwajibkan menggunakan masker bila keluar rumah, maka produsen dan penjual masker kemungkinan meraih untung. Begitu pula penyedia sanitiser, disinfektan, sabun, dan produk-produk turunannya. Sektor media (khususnya di luar media cetak) merupakan bisnis lainnya yang berpotensi meraih keuntungan dengan semakin banyaknya pemasang iklan akibat pembatasan pergerakan fisik.

Sektor pangan dianggap sebagai bisnis yang stabil di masa krisis, hanya mengalami penyesuaian metode, baik metode pemesanan, pembayaran, maupun pengiriman barang. Namun karena sektor ini memungkinkan untuk dilakukan oleh begitu banyak level usaha mulai skala mikro, sehingga akan terjadi peningkatan persaingan di tingkat bawah, maka secara individual dalam praktik dapat terjadi sebaliknya: pasar ada namun omset turun karena supply meningkat. Ada juga faktor lokasi yang mempengaruhi, di mana kawasan yang berubah sepi (misalnya sekolah yang libur) akan langsung terimbas, dan konsumen berpindah ke lokasi lain (di dekat rumah masing-masing).

Kerugian Individual dan Corporate (per pelaku bisnis)

Dari semua perhitungan kerugian di atas, implementasi akhirnya berada pada ranah individu dan entitas usaha. Negara mengalami ‘kerugian’ karena pendapatan anjlok –khususnya dari pajak—sedangkan belanja melonjak karena harus mengatasi kondisi darurat, menyediakan jaring pengaman sosial, mengatasi penderita sakit, pengerahkan aparat dan tenaga kesehatan ekstra, membayar bunga untuk utang baru, dll. Namun kerugian itu nanti akan dikompensasi pada pendapatan (pajak dan non-pajak) berikutnya, sehingga pada dasarnya negara akan impas alias tidak rugi, kecuali apabila dalam pelaksanaan ada kebocoran/pencurian/korupsi terhadap asset negara.

Maka kerugian nasional tsb akan ditransmisikan menjadi kerugian warga negara. Sehingga, angka Rp 517 Triliun + bunga utang negara yang baru, akan diturunkan menjadi kerugian perusahaan dan individu. Adapun secara umum bentuk nyata kerugian itu antara lain berupa:

Bagi entitas usaha:

- a. Hilangnya pendapatan karena tidak ada penjualan, namun pengeluaran tetap terjadi meski tidak sepenuhnya. Kerugian riil akan berbeda-beda tergantung jenis pengeluaran apa yang tetap dilakukan. Di antara pengeluaran yang relatif tetap adalah sewa tempat (atau penyusutan gedung apabila milik sendiri) beserta biaya rutin yang menyertainya, gaji

staf yang tidak mungkin di-PHK karena berbagai alasan, pengamanan, pembayaran kepada supplier yang tak bisa lagi ditunda, dll.

- b. Timbulnya denda/penalti akibat ketidaktepatan waktu pengiriman.
- c. Kerusakan barang apabila tertahan di gudang atau di jalan, atau pembayaran premi. tambahan apabila mengaplikasikan asuransi.
- d. Timbulnya biaya pesangon apabila melakukan PHK.
- e. Timbulnya denda/bunga apabila menggunakan dana talangan atau utang, atau apabila tidak dapat membayar sesuai ketentuan jumlah maupun waktu.
- f. Dana darurat atau dana sosial yang tidak dapat ditunda, dll.
- g. Kerugian apabila perusahaan terpaksa menjual asset dengan harga murah.
- h. Kerugian yang tak ternilai apabila krisis itu menyebabkan modal perusahaan terkuras hingga skala usaha menyusut atau bahkan bangkrut.
- i. Namun demikian, perusahaan mungkin memiliki pemasukan dari tagihan penjualan sebelumnya, yang tetap dapat mengurangi kerugian atau defisit anggaran pada bulan berjalan. Dengan catatan penagihan berhasil alias klien mampu membayar sesuai ketentuan.

Bagi Individu:

- a. Hilangnya gaji dan atau tunjangan selama masa krisis, atau hilangnya

pemasukan bagi pelaku usaha/profesi informal.

- b. Denda/bunga akibat telat atau tidak bayar kewajiban (misal cicilan kredit, utang jatuh tempo, dsb). Dan kerugian immateri apabila hal itu mengakibatkan performa ketaatan bayar menjadi buruk dalam catatan Bank Indonesia.
- c. Pengeluaran ekstra bagi anggota keluarga dalam kondisi darurat.
- d. Bunga utang baru apabila menggunakan dan talangan.
- e. Kerugian tak ternilai apabila krisis itu mengakibatkan hilangnya pekerjaan (karena PHK atau usaha bangkrut dan tidak dapat bangkit lagi).

Sebagai catatan, sampai dengan pertengahan April, telah terkonfirmasi oleh Kementerian Tenaga Kerja, terjadi PHK terhadap 1,5 juta pekerja (www.detik.com, 11/04/20). Dan tentu masih banyak yang tidak terkonfirmasi atau tidak melapor.

Potensi Kerugian Lainnya

Selain kerugian-kerugian yang dapat dikalkulasi di atas, masih ada potensi kerugian lain yang dapat terjadi akibat faktor non-bisnis. Misalnya apabila kesulitan ekonomi telah mengakibatkan peningkatan tindak kejahatan dan perusakan fasilitas usaha. Sebagaimana diketahui, lebih dari 30 ribu narapidana telah dibebaskan akibat kekhawatiran terhadap penyebaran Covid-19 di dalam lembaga pemasyarakatan (LP) yang penuh sesak (www.kompas.tv, 01/04/20). Para napi ini mengalami keagetan ekonomi juga, dan sebagian di antaranya telah terbukti melakukan tindak

kejahatan hanya beberapa hari saja setelah bebas. Di pekan ketiga April 2020 saja telah terjadi 3 kali perampokan minimarket di Jabodetabek, serta berbagai pencurian dan perampokan yang melibatkan residivis di berbagai daerah.

Selain tindak kejahatan, potensi chaos akibat krisis ekonomi juga dapat saja terjadi. Situasi kekacauan massal itu dapat mengakibatkan kerugian tak terduga seperti perusakan properti, kehancuran kendaraan, kerusakan fasilitas umum dan wisata, juga menimbulkan biaya pengamanan yang harus ditanggung masyarakat. Kondisi chaos juga dapat merembet ke penjarahan massal terhadap toko-toko atau pabrik, atau bahkan juga mengorbankan nyawa atau kehormatan manusia. Situasi abnormal, baik karena merebaknya tindak kejahatan maupun situasi chaos, itu tidak dikalkulasikan nilai (value)-nya karena tergantung skala, luasan, dan berapa lama waktunya terjadinya. Namun faktor ini hanya akan timbul apabila pembatasan berlaku berkepanjangan hingga krisis memuncak atau sulit dikendalikan.

Menyiasati Kerugian

Di dunia bisnis selalu ada untung dan ada rugi. Bagi pelaku bisnis yang sempat melakukan diversifikasi lintas sektoral dengan jenis bisnis yang berada pada kutub berbeda, berkemungkinan untuk selamat dari krisis. Misalnya mereka rugi dari usahanya pada penyewaan alat pesta -- karena semua kegiatan keramaian dilarang-- tetapi mereka punya juga kebun yang ditanami berbagai macam sayuran. Di saat krisis, hasil kebun justru mengalami peningkatan permintaan. Atau pengusaha sewa mobil yang sepi order, mendapat

kompensasi penghasilan dari permintaan pengiriman barang yang meningkat. Dan hal-hal sejenis yang dapat saja terjadi.

Bagi bisnis skala besar, biasanya telah terjadi konglomerasi lintas sektoral, sehingga bisa dilakukan subsidi silang antar entitas bisnis dalam grup. Secara keseluruhan mungkin mereka mengalami kerugian, namun masih dapat terselamatkan melalui bisnis di sektor lainnya. Akan menjadi masalah apabila konglomerasi terjadi pada sektor yang sama, misalnya dari hulu ke hilir dan tidak merambah sektor lain. Bagi usaha yang memiliki dana cash juga dapat menyiasati kerugian, yakni dengan membeli asset atau bisnis yang bagus namun dijual murah. Mungkin dana tunai itu didapat dari penjualan asset dengan harga murah (artinya secara akuntansi mengalami kerugian), namun apabila digunakan untuk mendapatkan asset lain yang lebih baik, maka dapat saja menghasilkan keuntungan. Dan setelah krisis berakhir, asset baru itu dapat berproduksi lebih baik, atau dijual dengan harga yang jauh lebih mahal, cukup untuk kompensasi kerugian.

Bagaimana bila diversifikasi maupun upaya lain tidak dapat dilakukan untuk mengurangi kerugian? Akhirnya secara umum akan ditempuh langkah yang sama, yaitu penghematan. Semua kalangan akan berusaha mengurangi pengeluaran sebisa mungkin, dan berusaha bertahan selama mungkin. Selanjutnya apabila masih tidak mencukupi, akan melakukan langkah berikutnya yaitu mencari pinjaman atau utang. Setelah itu, mencari cara untuk mendapatkan income atau pemasukan baru.

Langkah-langkah seperti ini akan ditempuh baik oleh individu, pelaku usaha mikro, perusahaan, organisasi, juga oleh negara. Pabrikan mobil global seperti Toyota telah mengajukan utang baru sekitar USD 9 Miliar (Rp 135 Triliun) untuk mengatasi masa krisis (www.bisnis.com, 27/03/20).

Maka wajar apabila begitu pandemi menerjang, lembaga pemberi pinjaman seperti International Monetary Fund (IMF) langsung menawarkan paket utang ke negara-negara potensial. Indonesia pun telah menerbitkan Global Bond atau surat utang, yang kemudian disebut pandemic bond senilai USD 4,3 Miliar pada awal April 2020 (www.cnbcindonesia.com, 13/04/20).

Langkah-langkah penghematan, pencarian pinjaman, dan upaya mendapatkan pemasukan baru, merupakan langkah umum untuk survive. Survival pada saat krisis ini dianggap sangat penting, sebagai modal untuk mencari pengganti kerugian pasca krisis. Karena apabila tidak dapat bertahan, lalu keburu collaps sebelum krisis berakhir, maka seluruh potensi pengembalian kerugian akan hilang. Sebagai contoh apabila perusahaan bangkrut, maka yang dapat dilakukan hanya melepas asset untuk menutup kewajiban, lalu perusahaan tidak dapat beroperasi lagi, bahkan mungkin pemegang saham masih menanggung warisan utang. Sedangkan apabila perusahaan selamat, masih dapat berjalan meski harus mencicil utang baru, maka masih ada harapan untuk mendapatkan keuntungan setelah krisis berakhir.

Apabila seluruh individu, entitas usaha, organisasi-organisasi non-bisnis, dan semua bagian dari sebuah negara dapat melewati masa krisis, tetap survive dan kembali

berproduksi, maka pada akhirnya kerugian nasional akan tertutupi. Oleh karena mereka akan kembali mampu membayar pajak, bahkan mungkin lebih banyak. Juga akan menyerap tenaga kerja baru sehingga meningkatkan pendapatan individu, yang ujung-ujungnya juga meningkatkan pendapatan negara dan mendongkrak PDB.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa kunci dari penyehatan kembali kondisi ekonomi nasional adalah survival di tingkat individu dan entitas usaha. Oleh karena itu negara harus mengerahkan segenap upaya, termasuk dengan memberikan stimulus, agar rakyatnya tidak collaps semasa krisis, tetap produktif dan memiliki penghasilan memadai, serta bisnis dapat terus berjalan.

Yang diperlukan adalah kebijakan yang tepat, baik secara lokasi, waktu, maupun prosedurnya. Apabila PSBB dapat menjamin putusnya rantai penularan Covid-19, maka lakukanlah dengan benar, dan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Pembatasan yang berkepanjangan, atau berpindah-pindah lokasi karena tidak serempak, berisiko melampaui batas kemampuan survival individu maupun entitas bisnis. Dan bila itu yang terjadi, maka penyelamatan tidak dapat dilakukan, dan kerugian akan semakin besar baik secara ekonomi maupun sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, 1998. *Qualitative Inquiry: Choosing Among Five Traditions*. USA: Sage Publications Inc

- Fuchs, Christian, 2011 “Teaching and Learning Guide for: New Media, Web 2.0 and Surveillance’ *Sociology Compass* 5/6 (2011): 480–487, 10.1111/j.1751-9020.2011.00378
- Rudiatin, E., & Ramadhan, A. I. (2018). Kekuatan Moral Dan Budaya, Mendukung Perekonomian Indonesia: Sebuah Gambaran Usaha Kecil Dan Menengah. *BASKARA Journal of Business & Entrepreneurship*, 1(1), 21-34.
- Republika Online, 2020. Sudah Pesan Tiket? Perhatikan Pembatalan Jadwal Kereta Ini.. <https://republika.co.id/berita/q7kq72396/sudah-pesan-tiket-perhatikan-pembatalan-jadwal-kereta-ini+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id...> [Online] Tersedia: [23 Maret 2020].
- Republika Online, 2020. Covid19-terus-meningkat-kai-batalkan-28-ka-jarak-jauh. <https://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/q7xlu9384/covid19-terus-meningkat-kai-batalkan-28-ka-jarak-jauh>. [Online] Tersedia: [29 Maret 2020].
- Pasardana, 2020, Penjelasan Sri Mulyani Terkait Sumber Pendanaan Untuk Penanganan Covid--19 di Indonesia. <https://pasardana.id/news/2020/4/2/pe-njelasan-sri-mulyani-terkait-sumber-pendanaan-untuk-penanganan-covid-19-di-indonesia/> [Online] Tersedia: [2 April 2020].
- cnbcindonesia.com, 2020. Sri Mulyani: Puncak Positif Covid-19 di RI Pada April-Mei <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200401093607-4-148938/sri-mulyani-puncak-positif-covid-19-di-ri-pada-april-mei>. [Online] Tersedia: [1 April 2020].
- cnbcindonesia.com,2020. Jangan Khawatir, Ternyata Ini Tujuan Global Bond Terbesar RI! <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200413131523-4-151515/jangan-khawatir-ternyata-ini-tujuan-global-bond-terbesar-ri>. [Online] Tersedia: [13 April 2020].
- Bisnis.com, 2020. Toyota Dikabarkan Cari Pinjaman di Bank Jepang. <https://kabar24.bisnis.com/read/20200327/19/1218917/toyota-dikabarkan-cari-pinjaman-di-bank-jepang>. [Online] Tersedia: [27Maret 2020].
- Kompastv, 2020. Imbas Wabah Corona, 30.000 lebih Narapidana dan Anak di Indonesia Segera Bebas. <https://www.kompas.tv/article/74094/imbas-wabah-corona-30-000-lebih-narapidana-dan-anak-di-indonesia-segera-bebas?page=all>. [Online] Tersedia: [1 April 2020].
- Detik.com, 2020. Jumlah Pekerja Dirumahkan dan Kena PHK Naik Jadi 1,5 Juta. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4973759/jumlah-pekerja-dirumahkan-dan-kena-phk-naik-jadi-15-juta>. [Online] Tersedia: [11 April 2020].

